

**PENGARUH *E-GOVERNMENT* DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2019-2022)**

(Skripsi)

Oleh

AS'SYIFA QOLBI MAHARANI

2011031007



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PENGARUH *E-GOVERNMENT* DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2019-2022)

Oleh

AS'SYIFA QOLBI MAHARANI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *e-government* dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian merupakan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Tahun amatan pada penelitian ini adalah 2019 s.d. 2022. Sampel yang terpilih yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah 1.188 kabupaten/kota. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan variabel independen adalah *e-government* dan transparansi. Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji simultan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *e-government* dan transparansi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *E-Government*, Transparansi, dan Kualitas LKPD

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF E-GOVERNMENT AND TRANSPARENCY ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS

(Study on the Local Government of Regencies/Cities in Indonesia for 2019-2022)

By

AS'SYIFA QOLBI MAHARANI

The purpose of this research is to determine the effect of e-government and transparency on the quality of local government financial reports. The research method used is quantitative. The population of the study encompasses all regencies/cities in Indonesia. The observation years for this study are from 2019 to 2022. The selected sample used as the research object is 1,188 regencies/cities. The dependent variable in this study is the quality of local government financial reports, while the independent variables are e-government and transparency. The results of the partial test in this study indicate that e-government has a significant effect on the quality of local government financial reports, while transparency does not have a significant effect on the quality of local government financial reports. The simultaneous test results from this research show that e-government and transparency together have a significant effect on the quality of financial reports.

Keywords: *E-Government, Transparency, and The Quality Of Regional Government Financial Report*

**PENGARUH *E-GOVERNMENT* DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2019-2022)**

Oleh

AS'SYIFA QOLBI MAHARANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA
AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENGARUH E-GOVERNMENT DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (Studi Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2019-
2022)**

Nama Mahasiswa

: As'syifa Qolbi Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011031007

Program Studi

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

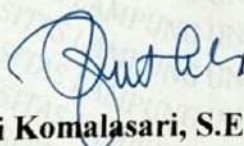
1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19750620 200012 2001

2. Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., C.M.A.

NIP. 19700801 199512 2001

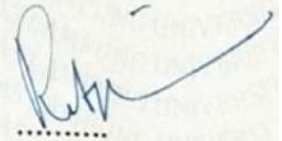
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

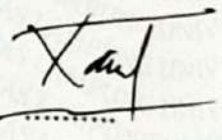
Ketua : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.**

.....


Penguji Utama : **Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

.....


Penguji Kedua : **Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA**

.....


2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Juli 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : As'syifa Qolbi Maharani
NPM : 2011031007
Program Studi : S1 Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jln. Malabar, Blok Q No. 15, Perumnas Way Halim, Way
Halim, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dari sumbernya, dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025

Penulis,



As'syifa Qolbi Maharani

NPM 2011031007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap As'syifa Qolbi Maharani, lahir pada tanggal 24 Oktober 2002 di Bandar Lampung yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang berasal dari pasangan Bapak Elpis Riyadi dan Ibu Rahayu Idayani. Penulis telah menempuh Pendidikan Taman Kanak–kanak di TK Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Pahoman yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun yang sama juga, penulis diterima sebagai salah satu Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam UKM-U Kopma Unila sebagai staff keuangan periode 2021 dan UKM-F *Economic & Business Entrepreneur Club* (EBEC) sebagai staff kesekretariatan periode 2022. Pada tahun 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Krui, Pesisir Barat.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayahanda Elpis Riyadi dan Ibunda Rahayu Idayani

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas.

Terima kasih telah melahirkan, merawat, membimbing, menafkahi dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta senantiasa mendoakan dan memberikan semangat juga dukungan sepenuh hati. Karya ini kuhasilkan sebagai bentuk terima kasihku kepada orang tuaku.

Adikku tersayang, Attaya' Fitri Sumaya

Terima kasih telah turut selalu mendoakan keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena kamu adalah penghiburku dan penyemangatku.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku

Terima kasih atas doa dan dukungan yang terus diberikan.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.”

(H.R. Bukhari dan Muslim)

“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all—in which case, you fail by default.”

(J. K. Rowling)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh *E-Government* Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2019-2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., C.M.A., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik, dukungan, doa serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA., selaku dosen pembahas dua yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., C.A., CPA. dan Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung;
8. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu baik proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini;
9. Kedua orangtuaku tercinta, Papa Elpis Riyadi dan Mama Rahayu Idayani yang telah mendoakan dan meridhoi setiap langkahku, mengerahkan segala upaya dan memberikan fasilitas terbaik untukku, dukungan dan penyemangat juga senantiasa sabar menantikanku untuk menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untukku disetiap sujudmu;
10. Adikku tersayang, Attaya yang selalu mendukungku, menghiburku, mendoakanku dan penyemangatku untuk menyelesaikan perkuliahan;
11. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu percaya bahwa aku dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
12. Seseorang dapat dipercaya, yaitu Mohamad Fadhl Ramirez, terima kasih telah memberikan dukungan dan bantuan untuk diriku.
13. Para sahabatku di masa sekolah, yaitu Asti, Prama, Sepia, Sinar, Celi, Haura, Lathifa dan Siti yang tetap ada bersamaku, terima kasih atas semua bantuan, semangat, kebaikan, kebahagiaan, kesedihan. Terima kasih karena selalu ada untukku dan tidak pernah meninggalkanku;
14. Para sahabatku di masa perkuliahan dan magang, yaitu Anisa, Astrid, Finny, Chyntia, Kak Sekar, Marisa, Talitha, dan Zakiya. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dukungan di hari-hari perkuliahan. Terima kasih sudah selalu bersedia menjadi tempat curhatku dan bisa kuandalkan. Semoga berakhirnya perkuliahan tidak menjadikan putusnya pertemanan ini;
15. Seluruh teman KKN Desa Pajar Bulan Krui, yaitu Maria, Ockta, Diah, Sarah, Yola, Tasya, Rizki, Fadel, Ubai, Tedy, Rendi, dan Iqbal yang mau berbagi kebahagiaan maupun kesedihan selama masa KKN. Terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan kepadaku.
16. Sahabat *online*-ku, Novi, terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita bahagia maupun keluh kesah.

17. Seluruh teman-teman Akuntansi 2020, terima kasih telah menemani perjalanan perkuliahanku dan saling memberikan dukungan selama masa kuliah;
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;
19. Terakhir Almamater tercinta, Universitas Lampung yang selama ini menjadi media bagi penulis untuk menggali ilmu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun agar lebih baik. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumber informasi literatur untuk penulisan karya ilmiah berikutnya.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025

Penulis

As'syifa Qolbi Maharani

DAFTAR ISI

Halaman.

DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Teori	12
2. 1.1. Teori Agensi	12
2. 1.2. Teori Legitimasi.....	13
2.1.3. <i>E-Government</i>	13
2. 1. 4. Transparansi.....	19
2. 1. 5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2.2. Kerangka Konseptual	26
2.3. Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis	27
2.3.1. Pengaruh <i>E-Government</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2019-2022	29
2.3.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2019-2022	31

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Populasi dan Sampel	34
3.3. Variabel Penelitian	35
3.3.1. Variabel Dependen (Y).....	35
3.3.2. Variabel Independen (X)	36
3.4. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	38
3.5. Metode Analisis Data	39
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	39
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	40
3.5.3. Uji Hipotesis	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.2. Pengujian Hipotesis.....	44
4.2.1. Statistik Deskriptif.....	44
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	46
4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda	48
4.2.4. Hasil Uji Hipotesis.....	49
4.3. Pembahasan.....	51
4.3.1. Pengaruh <i>E-Government</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	51
4.3.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Keterbatasan Penelitian	58
5.3. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR GRAFIK

Halaman.

Grafik 1. 1 Peringkat <i>E-government</i> Indonesia di Dunia.....	4
Grafik 1. 2 Perkembangan Skor Pelaksanaan Transparansi Fiskal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari 2018-2022	4
Grafik 1. 3 Perkembangan Opini LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018-2022.....	5
Grafik 4. 1 Perkembangan Rata-Rata Nilai Indeks SPBE Kab/Kota di Indonesia	45

DAFTAR TABEL

	Halaman.
Tabel 1. 1 Opini LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022.....	6
Tabel 2. 1 Kategori Nilai Indeks SPBE.....	17
Tabel 2. 2 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Layanan SPBE	18
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel.....	35
Tabel 3. 2 Operasional Variabel	38
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	47
Tabel 4. 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t).....	49
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	51

DAFTAR GAMBAR

Halaman.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	26
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seluruh aspek perekonomian yang berkaitan dengan layanan dan lembaga pemerintahan termasuk ke dalam sektor publik. Karena definisi organisasi sektor publik adalah lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola anggaran dan dana masyarakat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, organisasi sektor publik saat ini juga ikut serta dalam menawarkan layanan atau memproduksi barang publik. Orientasi organisasi pemerintah berbeda dari organisasi swasta atau perusahaan, organisasi pemerintah diarahkan untuk memberikan layanan publik, sedangkan perusahaan swasta hanya berfokus pada keuntungan atau *profit*. Sektor publik adalah komponen yang berkaitan kuat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, sektor publik memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti layanan publik yang dimiliki pemerintah. Dalam keuangan pemerintah daerah tentunya terikat erat dengan cara pengelolaan aset serta pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang diatur pada peraturan, regulasi, maupun undang-undang yang berlaku (Yulinchton *et al.*, 2022).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur stabilitas aktivitas pemerintahannya. Pemerintah daerah perlu mengamati berbagai macam potensi maupun permasalahan yang dialami oleh daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap masyarakat dan organisasi terkait. Penguatan tuntutan atas akuntabilitas serta transparansi atas seluruh lembaga publik daerah merupakan bentuk perkembangan dari aktivitas sektor publik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya ialah melalui instrumen akuntabilitas yang diterapkan secara teratur, akuntabilitas tersebut mengacu pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas pencapaian dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas organisasi (Hartono & Ramdany, 2020).

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah ialah dengan memberikan informasi mengenai hasil aktivitas dan kinerja kepada khalayak umum. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut menjelaskan betapa pentingnya tanggungjawab dan kewajiban untuk melaporkan seluruh hasil aktivitas maupun kinerja yang berkaitan dengan penyusunan APBD pemerintah daerah yang selanjutnya melaporkan ke pemerintah pusat serta kedua pemerintahan tersebut melaporkannya ke khalayak umum yaitu masyarakat. Pelaporan tersebut salah satunya berbentuk penerbitan laporan keuangan. Usaha nyata penerbitan pelaporan keuangan tersebut merupakan dalam rangka manifestasi akuntabilitas serta transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah diberikan mandat serta kepercayaan untuk mengelola aset, pendapatan, maupun pengeluaran daerah. Pengelolaan ketiga hal tersebut harus dilaporkan dan dijelaskan dalam suatu laporan, yaitu laporan keuangan. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa penerbitan laporan keuangan merupakan bentuk tanggungjawab dari tugas pemerintah. Laporan tersebut berguna untuk evaluasi mengenai hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintah untuk masa yang akan datang (Setianingrum & Haryanto, 2020). Agar dapat memenuhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tentunya perlu keterbukaan atau transparansi informasi mengenai pengelolaan aset, pendapatan, dan pengeluaran. Karena hal tersebut pemerintah seharusnya bersifat transparan dalam penyajian informasi mengenai laporan keuangan daerahnya.

Pemerintah Indonesia termasuk gencar dalam urusan pembangunan negara. Pemerintah memiliki misi pembangunan nasional agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Selain itu, pemerintah juga senantiasa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah akan hal tersebut ialah pengoptimalan teknologi informasi. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berinovasi untuk mencapai hal tersebut. Untuk itulah Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018

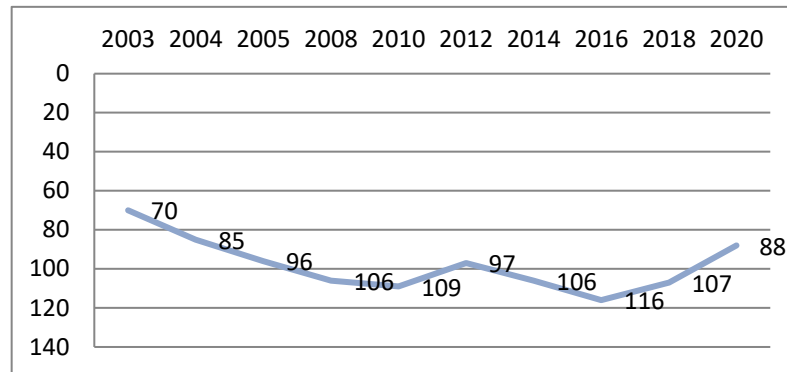
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah berharap dengan adanya peraturan yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat ikut berkontribusi dalam mencapai pembangunan nasional.

Berdasarkan Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden tersebut bahwa salah satu sistem informasi dan teknologi yang dapat mendukung tercapainya praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah dengan pemanfaatan *e-government*. *E-government* diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Di Indonesia sendiri, sejak ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, mengharuskan setiap organisasi pemerintah, dari lingkup pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah untuk merancang dan mengembangkan, serta mengimplementasikan konsep *e-government*, sebagai wadah penyaluran informasi kepada publik. Intinya, penerapan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan transparansi (keterbukaan) informasi seluas-luas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Dikutip dari laporan Humas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertulis pada webiste menpan.go.id, *United Nations* (UN) *E-Government Survey 2022* telah menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018.

Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0,6612 di dalam grup *High E-Government Development Index* (EGDI) di UN *E-Government Survey 2020* sehingga berhasil menempatkan Indonesia masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai *Very High* EGDI, untuk poin 0.50 sampai 0.75 sebagai *High* EGDI, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai *Middle* EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai *Low* EGDI. Berikut merupakan grafik peningkatan peringkat *e-government* Indonesia di dunia:

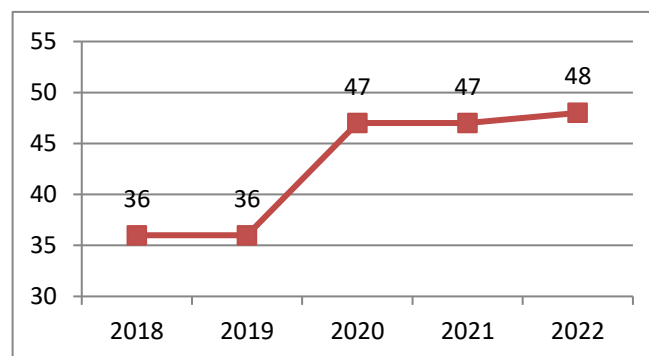
Grafik 1. 1 Peringkat *E-government* Indonesia di Dunia



Sumber: *Website* resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Transparansi dalam pemerintahan menjamin masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan informasi terkait kebijakan serta program-program pemerintah. Peraturan mengenai transparansi di Indonesia mulai dari ditetapkannya Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini mengatur pengelolaan informasi publik pada badan publik termasuk menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan penyelenggara daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan sehingga wajib mengimplementasikan regulasi tersebut. Berikut merupakan grafik perkembangan skor pelaksanaan transparansi fiskal laporan keuangan pemerintah pusat.

Grafik 1. 2 Perkembangan Skor Pelaksanaan Transparansi Fiskal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari 2018-2022



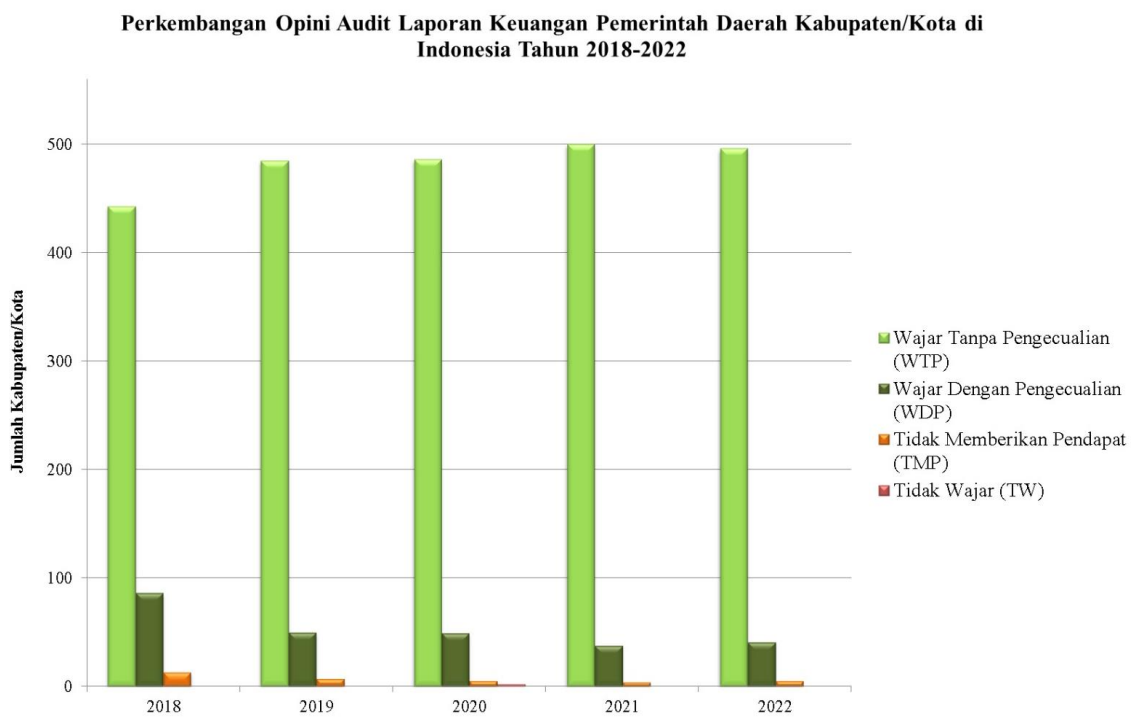
Sumber: IHPS Semester I Tahun 2018-2022

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan atas pelaksanaan transparansi fiskal laporan keuangan pemerintah pusat. Tujuan dari pelaksanaan

transparansi fiskal berguna dalam memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat yang berpedoman pada praktik-praktik yang baik. Peningkatan skor transparansi fiskal laporan keuangan pemerintah pusat mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat semakin berusaha terbuka dalam keterbukaan akses informasi mengenai hal yang berkaitan dengan fiskal atau keuangan. Dikarenakan keterbukaan akses informasi oleh pemerintah pusat, hendaknya pemerintah daerah juga dapat mengikuti hal tersebut guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Berikut ditampilkan grafik mengenai perkembangan mengenai opini audit untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2018-2022.

Grafik 1. 3 Perkembangan Opini LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: IHPS Semester I Tahun 2023

Perkembangan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota juga sudah mulai membaik. Terdapat peningkatan opini audit wajar tanpa pengecualian sejak tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022 tepatnya di semester I, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan

pemeriksaan terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Indonesia baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk tahun 2021. Terdapat 542 Pemda yang wajib untuk menyusun laporan tersebut. Pada pemeriksaan untuk tahun tersebut terdapat 1 Kabupaten yang tidak menyerahkan laporan keuangan. Provinsi tersebut ialah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Pemeriksaan LKPD tahun 2021 terdiri dari Neraca Per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang (LPSAL/K), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan-laporan tersebut wajib dilaporkan setiap periode sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2022).

Berikut merupakan pengungkapan opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten/Kota tahun 2022 yang telah diperiksa pada tahun 2022 semester I.

Tabel 1. 1 Opini LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022

No.	Provinsi Di Indonesia	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Laporan Keuangan Pemerintah Daaerahnya Mendapat Opini:			
		Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	Tidak Wajar (Adversed)
Sumatera					
1.	Aceh	23	-	-	-
2.	Sumatera Utara	27	6	-	-
3.	Sumatera Barat	19	-	-	-
4.	Riau	11	-	1	-
5.	Kepulauan Riau	7	-	-	-
6.	Jambi	10	1	-	-
7.	Bengkulu	9	1	-	-
8.	Sumatera Selatan	13	4	-	-

No.	Provinsi Di Indonesia	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya Mendapat Opini:			
		Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	Tidak Wajar (Adversed)
9.	Bangka Belitung	7	-	-	-
10.	Lampung	12	3	-	-
Jawa					
1.	Banten	8	-	-	-
2.	Jawa Barat	24	3	-	-
3.	DKI Jakarta	1	-	-	-
4.	Jawa Tengah	34	1	-	-
5.	Jawa Timur	38	-	-	-
6.	DI Yogyakarta	5	-	-	-
Bali dan Nusa Tenggara					
1.	Bali	9	-	-	-
2.	Nusa Tenggara Barat	9	1	-	-
3.	Nusa Tenggara Timur	22	-	-	-
Kalimatan					
1.	Kalimantan Barat	14	-	-	-
2.	Kalimantan Selatan	13	-	-	-
3.	Kalimantan Tengah	13	1	-	-
4.	Kalimantan Timur	10	-	-	-
5.	Kalimantan Utara	5	-	-	-

No.	Provinsi Di Indonesia	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Laporan Keuangan Pemerintah Daaerahnya Mendapat Opini:			
		Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	Tidak Wajar (Adversed)
Sulawesi					
1.	Gorontalo	6	-	-	-
2.	Sulawesi Selatan	22	2	-	-
3.	Sulawesi Tenggara	16	1	-	-
4.	Sulawesi Tengah	11	2	-	-
5.	Sulawesi Utara	15	-	-	-
6.	Sulawesi Barat	6	-	-	-
Maluku					
1.	Maluku	6	3	2	-
2.	Maluku Utara	9	1	-	-
Papua					
1.	Papua	21	6	2	-
2.	Papua Barat	13	-	-	-
Total	465	36	8	-	

Sumber: IHPS Semester I Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam melakukan investigasi dan audit terhadap laporan keuangan pemda mengeluarkan empat opini. Opini audit tersebut terdiri dari wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat (TMP) serta *adversed* atau tidak wajar. Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang laporan keuangannya masih diberi opini selain wajar tanpa pengecualian, yaitu wajar dengan pengecualian dan *disclaimer* oleh BPK RI. Keragaman opini

audit pada LKPD kabupaten/kota tersebut menjadi pertimbangan apakah tingkatan kualitas laporan keuangan pemda di Indonesia termasuk baik atau bisa saja buruk.

Selain itu, dikarenakan adanya laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan opini audit oleh BPK RI selain wajar tanpa pengecualian mengindikasikan adanya sesuatu yang terjadi baik dalam alokasi anggaran, pengelolaan aset daerah, maupun perumusan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan (*decission making*) (Rompas, F. V., dan Kindangen, 2022).

Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas juga merupakan sumber informasi yang berguna karena kebenaran akan informasi di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Dikarenakan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk tanggungjawab Pemda dalam menjalankan tugasnya, laporan tersebut harus bersifat terbuka akan informasi yang ada di dalamnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prayogo & Setiany (2020) dan Redjo (2018), mengemukakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiawan & Nuryati (2022), transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Temalagi, dkk. (2022), transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Lalu, pada penelitian yang dilakukan oleh Pramita & Dharma (2018) dan Tullah, dkk. (2018), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sutopo, dkk. (2017), pelaksanaan *e-government* berpengaruh positif terhadap kinerja administrasi pemerintah daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Handayani (2019) serta Wulandari & Bandi (2015) menyatakan bahwa penerapan dari *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta masih terdapat beberapa penelitian terdahulu hasilnya masih berbeda-beda, maka peneliti tertarik menguji mengenai pengaruh *e-government* dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia serta peneliti memberikan judul “Pengaruh *E-Government* dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2019-2022)” pada penelitian kali ini. Adapun keterbaharuan dari penelitian kali ini adalah peneliti menggunakan data sekunder karena masih cukup sedikit penelitian mengenai *e-government* serta transparansi yang menggunakan data tersebut. Mayoritas menggunakan data primer atau data yang diambil secara langsung. Keterbaharuan selanjutnya dari penelitian kali ini adalah menggunakan variabel *e-government* untuk diuji apakah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keterbaharuan lainnya dari penelitian kali ini adalah menggunakan populasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya mayoritas mengambil populasi pada satu wilayah atau instansi saja dengan berdasarkan studi kasus.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan alasan utama melakukan penelitian serta pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh dari *e-government* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia periode 2019-2022?
2. Bagaimanakah pengaruh dari transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia periode 2019-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari *e-government* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia periode 2019-2022.
2. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia periode 2019-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari semua upaya yang dilakukan peneliti, tujuan melakukan penelitian adalah agar pembaca mendapatkan sesuatu dari temuan yang peneliti lakukan. Berikut manfaat yang diharapkan akan didapat dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan penuh mengenai pengaruh dari *e-government* dan transparansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia periode 2019-2022
2. Bagi pemerintah hendaknya diharapkan dapat lebih serius dalam membuat perencanaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya supaya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat akan kinerja yang selama ini telah dilakukan.
3. Bagi para peneliti kedepannya yang berniat akan melakukan penelitian seperti ini kembali, diharapkan penelitian ini memberikan inspirasi, melakukan penelitian kembali hingga melengkapi dan memberikan kejelasan lebih terhadap penelitiannya.
4. Bagi para pembaca diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan lebih mengenai pengaruh dari *e-government* dan transparansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia periode 2019-2022

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Teori

Teori yang dijadikan tinjauan dalam penelitian kali ini yaitu terdiri dari *e-government*, transparansi, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta teori agensi.

2. 1.1. Teori Agensi

Hubungan antara dua pihak, yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), disebut sebagai teori keagenan. Menurut teori keagenan, suatu masalah atau konflik akan terjadi jika terjadi pembagian kekayaan dan kekuasaan antara pemilik yang berperan sebagai prinsipal dengan manajer yang berperan sebagai agen yang membantu dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pihak akan selalu ingin meningkatkan fungsi utilitasnya. Ketika ada dua kepentingan yang bersaing dalam suatu pemerintahan, terjadi asimetri informasi yang mengakibatkan kesulitan keagenan (Abbas, dkk. 2022). Dalam organisasi sektor publik menyatakan bahwa pemegang tanggungjawab yaitu pemerintah yang berperan sebagai agen agar memberikan pertanggungjawaban dengan cara menampilkan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh tindakan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan yang dijalankan. Pihak agen akan mengawasi sumber daya keuangan terhadap pihak rakyat dimana sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal juga berhak untuk meminta tanggungjawab tersebut (Zubaidah & Nugraeni, 2023). Dapat diartikan juga bahwa agen akan menerima instruksi dari prinsipal yang bertujuan menyelesaikan tugas tertentu sesuai dengan peraturan maupun regulasi atas lembaga pemerintahan yang terkait. Pemerintah dengan kapabilitas sebagai agen, berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pihak prinsipal, yaitu masyarakat (Khikmah et al., 2024). Penelitian ini menggunakan

teori agensi dikarenakan masih banyak terjadi ketimpangan informasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak manajemen (*agent*) terkadang kurang maksimal dalam memenuhi kewajibannya untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran atau keuangan. Hal tersebut membuat asimetri informasi bagi pihak pemilik (*principal*) yaitu pemerintah pusat dan masyarakat. Kedua pihak tersebut akan menimbulkan rasa ragu terhadap pemerintah daerah dikarenakan minimnya pengungkapan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran atau keuangan.

2. 1.2. Teori Legitimasi

Legitimasi dapat diartikan sebagai kepatuhan organisasi terhadap pemenuhan harapan masyarakat. Organisasi akan dianggap tidak sah, apabila organisasi tersebut gagal dalam pemenuhan harapan masyarakat. Dampaknya berupa dikenakan sanksi sosial di tengah masyarakat. Kegiatan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial lingkungan. Sehingga untuk mendapatkan dukungan legitimasi, kegiatan organisasi dan pelaporannya harus sesuai dengan harapan masyarakat. Tuntutan publik terhadap organisasi sektor publik yaitu untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik. Pada penelitian ini, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam memenuhi harapan masyarakat. Pemenuhan harapan masyarakat dapat dicapai apabila Pemerintah Daerah berusaha untuk terbuka dengan memberikan akses informasi yang baik untuk masyarakat. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga bertujuan agar dapat memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang bertanggungjawab (Winata, 2020).

2.1.3. E-Government

E-government merupakan bentuk dari pemerintah disaat menjalankan tugasnya dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat dengan baik dengan menggunakan sarana berbasis internet ataupun teknologi digital lainnya (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018). Lalu, *e-government* dapat dikatakan sebagai kumpulan konsep untuk segala bidang yang terkait dengan sektor publik

baik pemerintahan pusat maupun daerah dimana pemanfaatan teknologi informasi sangat berkaitan dengan erat. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel (Rohmatun et al., 2022). Pengertian lainnya dari *e-government* merupakan upaya pemanfaatan atas teknologi informasi sebagai sarana untuk menyokong operasional sistem pemerintahan agar lebih efisien (Wulandari & Bandi, 2015). Penerapan *e-government* diperoleh dari integrasi proses-proses mendasar di berbagai fungsi pemerintahan, sehingga penerapan *e-government* tidak berdasar pada salah 1 lembaga pemerintahan saja seperti hanya pemerintah pusat saja atau hanya pemerintah daerah (Layne & Lee, 2001). *E-government* mengacu pada penyampaian informasi dan layanan pemerintah secara online melalui Internet atau sarana digital lainnya. Berbeda dengan struktur tradisional yang bersifat hierarkis, linier, dan satu arah, sistem penyampaian internet bersifat nonhierarki, nonlinier, dua arah, dan tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Sifat penyampaian internet yang non-hirarkis membebaskan masyarakat untuk mencari informasi sesuai keinginan mereka, tidak hanya pada jam operasional kantor pemerintah. Aspek interaktif dari *e-government* memungkinkan warga negara dan birokrat untuk mengirim dan menerima informasi. Dengan memfasilitasi interaksi dua arah, tata kelola elektronik diutamakan sebagai cara untuk meningkatkan penyampaian layanan dan daya tanggap terhadap masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (West, 2004).

Tujuan dari penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia agar administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif serta efisien. Selain itu agar dapat mencapai pelayanan publik yang bersifat transparan juga memuaskan (Purnomo & Handayani, 2019). Penerapan *e-government* bertujuan agar pemerintah dapat menata sistem manajemen, pelayanan, serta kinerja pada pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi (Heryana, 2013). Maka dengan adanya penerapan *e-government* ini pemerintah dapat menata sistem manajemen, pelayanan dan kinerja pada pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. *E-government* memiliki ciri-ciri dimana teknologi informasi dan komunikasi yang paling inovatif, penerapan internet berbasis web pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dapat mengakses

informasi dan layanan pemerintah secara lebih luas. Selain itu, penerapan *e-government* berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik serta menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara demokratis guna mencapai pemerintahan yang transparan (Sutopo et al., 2017).

Di Indonesia, penerapan *e-government* diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang merupakan bentuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan nasional oleh pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik.

Dalam Perpes tersebut dijelaskan bahwa *e-government* dijalankan dengan memrhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

2. Keterpaduan

Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya terkait yang mendukung SPBE.

3. Kestinambungan

Kestinambungan berarti keberlanjutan SPBE harus secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

4. Efisiensi

Efisiensi ialah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas tercapai dimana terdapat kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

6. Interoperabilitas

Interoperabilitas tercapai apabila terdapat koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

7. Keamanan

Keamanan dalam SPBE terdiri atas kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Tujuan pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Berbagai bentuk nyata dari penerapan *e-government* di Indonesia adalah terdapat banyak aplikasi, sistem informasi, maupun situs *website* yang menunjang praktik *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi dan sistem informasi yang dipakai dalam praktik *e-government* di Indonesia antara lain berhubungan dengan kepegawaian sipil, pendidikan, perpajakan daerah, pemerintahan daerah, serta portal pelayanan dan administrasi publik.

Implementasi *e-government* oleh pemerintah daerah sebelumnya dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan hasil evaluasi berupa Pemingkatan *E-Government* Indonesia (PeGi). Penilaian PeGi tersebut hanya berlaku sampai dengan tahun 2017 setelah berlakukannya Perpres

No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sehingga evaluasi *e-government* kemudian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) bukan oleh Kemenkominfo, sehingga pemeringkatan *e-government* dengan PeGi diubah menjadi indeks SPBE.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat lima kategori indeks SPBE dalam pemeringkatan *e-government* oleh Kemenpanrb. Lima kategeori tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kategori Nilai Indeks SPBE

Nilai Indeks	Predikat
4,2 s.d. 5,0	Memuaskan
3,5 s.d. < 4,2	Sangat Baik
2,6 s.d. < 3,5	Baik
1,8 s.d. < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penentuan penilaian indeks SPBE tentunya didasarkan atas metode pemantauan serta evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpanrb. Secara garis besar, sebelum menentukan indeks SPBE dilakukan penyusunan model tingkat kematangan SPBE, dilanjutkan dengan penilaian tingkat kematangan SPBE, serta pelaksanaan penilaian menggunakan indeks SPBE.

Model tingkat kematangan SPBE terdiri dari kematangan kapabilitas proses yang menggunakan Capability Maturity Model untuk pengukurannya. Serta kematangan kapabilitas layanan yang diukur dengan *E-Government Maturity Models*. Berikut merupakan kriteria dalam menentukan tingkat kematangan kapabilitas proses serta layanan SPBE:

Tabel 2. 2 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Layanan SPBE

Kematangan Kapabilitas	Tingkat	Kriteria
Proses	1—Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu
	2—Terkelola	Kriteria tingkat rintisan sudah terpenuhi dimana penerapan SPBE sudah dilakukan dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi
	3—Terdefinisi	Kriteria tingkat terkelola sudah terpenuhi dimana penerapan SPBE sudah dilakukan pada semua unit kerja
	4—Terpadu dan Terstruktur	Kriteria terdefinisi sudah terpenuhi dimana proses penerapan SPBE sudah sepenuhnya berkontribusi pada kinerja organisasi.
	5—Optimum	Kriteria tingkat terpadu dan terukur telah terpenuhi dimana proses penerapan SPBE meningkat dan berkualitas secara berkesinambungan.
Layanan	1—Informasi	Informasi layanan SPBE secara satu arah
	2—Interaksi	Kriteria informasi telah terpenuhi dimana layanan SPBE sudah dapat digunakan secara dua arah
	3—Transaksi	Kriteria interaksi telah terpenuhi dimana layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan memanfaatkan sumber daya
	4—Kolaborasi	Kriteria transaksi telah terpenuhi dimana layanan SPBE diberikan melalui integrasi layanan SPBE lain.

Kematangan Kapabilitas	Tingkat	Kriteria
	5—Optimum	Kriteria kolaborasi telah terpenuhi dimana layanan SPBE telah melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan kualitas untuk menyesuaikan perubahan kepentingan di lingkungan internal serta eksternal.

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2020

Setelah penyusunan model tingkat kematangan dilanjutkan dengan metode penilaian tingkat kematangan SPBE. Penilaian tingkat tersebut terdiri atas:

1. Domain

Domain merupakan area penerapan SPBE yang dinilai, terdiri dari kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

2. Aspek

Aspek merupakan area spesifik dari penilaian penerapan SPBE.

3. Indikator

Indikator merupakan informasi spesifik dari penilaian penerapan SPBE.

2. 1. 4. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu elemen kunci dalam *good governance*, berupa jaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan publik. Sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi publik akuntansi sektor publik berperan dalam pemberian keterbukaan dalam informasi keuangan.

Transparansi dalam pemerintahan menjamin masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan informasi terkait kebijakan serta program-program pemerintah. Peraturan mengenai transparansi di Indonesia mulai dari ditetapkannya Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini mengatur pengelolaan informasi publik pada badan publik

termasuk menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan penyelenggara daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan sehingga wajib mengimplementasikan UU KIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, di dalam kerangka konseptual yang tertera pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemda mengenai informasi keuangan yang bersifat terbuka dan jujur dimana setiap masyarakat memiliki hak atas akses keterbukaan informasi tersebut.

Transparansi dapat diartikan sebagai suatu konsep atau prinsip pada suatu organisasi untuk mengedepankan kejujuran dalam menyajikan informasi terkait kinerja keuangan dan kinerja manajerial. Transparansi publik merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi dari pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi juga dapat membatasi atau mencegah banyak peluang perilaku korupsi (Bertot, dkk. 2012).

Transparansi pada pemerintahan daerah dilaksanakan agar memastikan keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah bahwa pengelolaan anggaran harus bersifat terbuka dan jujur. Instruksi ini mengatur kewajiban Pemda untuk menampilkan sub menu terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah di laman web pada daerah masing-masing. Selain itu, pada instruksi tersebut dijelaskan bahwa Pemda harus mengunggah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran/keuangan guna keterbukaan informasi untuk masyarakat, Pemerintah Pusat, serta pihak lain yang berkaitan. 12 dokumen tersebut diantaranya terdiri dari:

1. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
2. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD
3. Raperda APBD
4. Raperda Perubahan APBD
5. Perda APBD

6. Perda Perubahan APBD
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD
9. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
10. Laporan Realisasi Anggaran PPKD
11. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
12. Perda dan Opini atas LKPD

Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah diakses oleh publik dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

2. 1. 5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintahan adalah laporan yang sistematis mengenai posisi keuangan serta segala transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan yang dimaksud ialah unit pemerintahan yang terdiri dari beberapa substansi akuntansi serta bersifat wajib dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan. Substansi tersebut terdiri dari (Nordiawan, 2012):

1. Pemerintah pusat
2. Pemda
3. Sistem organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah
4. Organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yaitu bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang menggambarkan secara sistematis mengenai posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah (Bastian, 2023). Kualitas laporan keuangan daerah merupakan ukuran dari

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang ada pada pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan uang dalam menjalankan transaksi tersebut (Pramita & Dharma, 2018). Tujuan umum akuntansi pemerintahan adalah menyediakan informasi keuangan bagi para penggunanya dalam pengambilan keputusan (*decision making*) (Tullah et al., 2018).

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerintah

Pemerintah harus memerhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas, dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya (Nordiawan, 2012). Laporan keuangan daerah digunakan untuk:

1. Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan
2. Menilai kondisi keuangan
3. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan
4. Membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitas laporan keuangan yang baik dan berkualitas meliputi sebagai berikut:

1. Relevan (*relevance*)

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kriteria dari informasi yang relevan terdiri dari:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
- c) Tepat waktu
- d) Lengkap

2. Andal (*reliability*),

Laporan keuangan bebas dari makna ataupun definisi yang menyesatkan dan kesalahan material. Selain itu laporan keuangan harus menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi kebenarannya. Informasi yang termuat dapat bersifat relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik dari informasi yang andal yaitu:

- a) Penyajian Jujur
- b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
- c) Netralitas

3. Dapat dibandingkan (*comparability*)

Laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

4. Dapat dipahami (*understandability*)

Laporan keuangan dapat mudah dipahami oleh setiap pengguna. Laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk maupun istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Karakteristik tersebut merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diimplementasikan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berguna bagi para pengguna, lengkap, terbuka, serta tidak menyesatkan, dan memenuhi karakteristik informasi keuangan seperti relevan, reliabel, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Gamayuni, 2018).

Dikutip dari Gamayuni, (2018) terdapat beberapa dimensi kualitas pelaporan keuangan menurut Beest, Braam, Boelens (2009) terdiri atas.

1. *Relevant*, terdiri atas 4 indikator:

- a) Laporan keuangan mengungkapkan informasi masa yang akan datang
- b) Mengungkapkan informasi tentang kesempatan bisnis dan risiko.
- c) Perusahaan menggunakan *fair value* sebagai basis pengukuran.
- d) Laporan keuangan memberikan informasi umpan balik mengenai beragam kejadian pasar dan transaksi signifikan yang memengaruhi perusahaan.

2. *Faithful Representation or Reliability*, terdiri atas 5 indikator:

- a) Laporan keuangan menjelaskan secara jelas asumsi dan perkiraan yang telah dibuat.
- b) Laporan keuangan menjelaskan secara jelas mengenai prinsip akuntansi yang dipilih.
- c) Laporan keuangan menjelaskan peristiwa positif dan negatif dengan cara yang seimbang ketika mendiskusikan hasil tahunan.
- d) Laporan keuangan meliputi *unqualified auditor's report*.
- e) Laporan keuangan secara luas mengungkapkan informasi mengenai *issue corporate governance*.

3. *Understandability* terdiri atas 5 indikator:
 - a) Laporan keuangan dikelola dengan baik.
 - b) Catatan atas neraca dan laporan laba rugi dibuat dengan jelas.
 - c) Grafik dan tabel mengklarifikasi informasi yang disajikan.
 - d) Penggunaan bahasa dan jargon teknis yang mudah diikuti dalam laporan keuangan.
 - e) Dalam laporan keuangan terdapat *glossary* yang lengkap.
4. *Comparability* terdiri atas 6 indikator:
 - a) Catatan atas perubahan kebijakan akuntansi menjelaskan akibat dari perubahan tersebut.
 - b) Catatan atas revisi estimasi dan *judgement* akuntansi menjelaskan akibat dari revisi tersebut.
 - c) Figur akuntansi perusahaan periode sebelumnya disesuaikan dengan implementasi perubahan kebijakan akuntansi atau revisi atas estimasi akuntansi.
 - d) Hasil akuntansi periode saat ini dibandingkan dengan hasil akuntansi periode sebelumnya.
 - e) Informasi dari laporan keuangan dibandingkan dengan informasi yang disajikan oleh organisasi yang lain.
 - f) Laporan keuangan menyajikan angka indeks keuangan dan rasio.
5. *Timelines* terdiri atas 1 indikator, yaitu natural logaritma dari jumlah hari yang dibutuhkan oleh auditor untuk menandatangani laporan auditor setelah akhir tahun buku.

Menurut Yuliani & Agustini, (2016), pada saat BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat diartikan bahwa laporan keuangan dari instansi tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar juga berkualitas. Opini audit wajar tanpa pengecualian mewakili suatu laporan keuangan berkualitas. Karena dasar auditor memberikan opini ialah ditinjau dari empat karakteristik keuangan, yaitu relevan, reliabel, dapat dipahami, serta dapat dipahami.. Jika suatu laporan keuangan sudah tercantum keempat unsur tersebut, maka auditor akan menilai bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas sehingga memberikan opini wajar

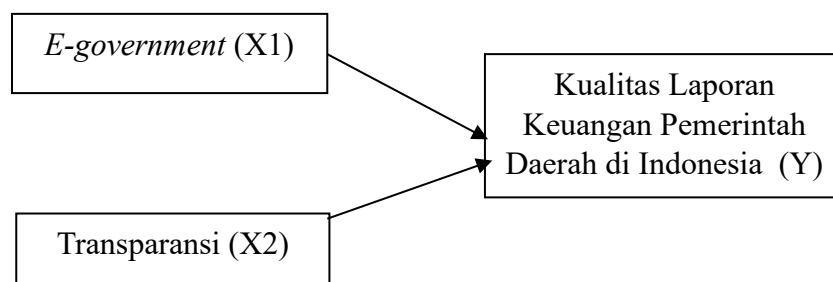
tanpa pengecualian. Menurut Christiaens & Van Peteghem, (2007), kualitas laporan keuangan dapat tercermin dari opini audit. Karena dari opini audit itulah terukur seberapa besar tingkat kepatuhan instansi dalam pelaporan keuangan. Sedangkan menurut Beest & Boelens, (2009), laporan keuangan pemerintah suatu daerah dapat dikatakan berkualitas jika laporan tersebut mendapat penilaian berupa opini audit dari lembaga terkait yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan. Ketika BPK RI memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD, dapat dikatakan bahwa laporan tersebut sudah disajikan dan dinyatakan secara wajar serta berkualitas. Dapat disimpulkan pengukuran kualitas laporan keuangan LKPD di Indonesia dapat dinilai dengan memperhatikan opini audit yang dinyatakan oleh BPK RI dalam pemeriksaannya terhadap setiap laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit yang dikeluarkan oleh BPK RI terdiri atas:

1. Wajar tanpa pengecualian (WTP)
2. Wajar dengan pengecualian (WDP)
3. *Disclaimer* atau tidak memberikan pendapat (TMP)
4. *Adversed* atau tidak wajar.

2.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan latar belakang serta tinjauan teori yang telah dijelaskan. Penulis memutuskan untuk menggunakan kerangka konseptual seperti berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.3. Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

Berikut merupakan perumusan hipotesis serta daftar penelitian terdahulu yang telah dilakukan pengujian dan akan menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abbas, dkk. (2022).	<i>Influence Of Internal Control System Weaknesses And Audit Quality On The Quality Of Local Government Financial Reports In Indonesia With Good Government Governance As Moderating.</i>	Unsur <i>Good Government Governance</i> yaitu, transparansi dapat memoderasi pengaruh positif kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Budiawan & Nuryati (2022).	<i>Understanding the Implementation of Good Government Governance (GGG) on The Quality of Public Services.</i>	Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
3.	Haustein & Lorson (2023).	<i>Transparency of Local Government Financial Statements: Analyzing Citizens' Perceptions. Financial Accountability & Management.</i>	Pada penelitian tersebut, masyarakat yang dijadikan objek penelitian telah memahami informasi terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, dapat dikatakan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tergolong sudah efektif.
4.	Heryana (2013).	Pengaruh Penerapan <i>E-Government</i> Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur.	Penerapan <i>e-government</i> memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur.

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Purnomo & Handayani (2019).	Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, <i>Good Governance</i> Dan <i>E-Government</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Penerapan <i>e-government</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
6.	Pramita & Dharma (2018).	<i>Effect Of Application Of Good Governance, Government Accounting Standards And Apparatus On Quality Of Financial Statements.</i>	Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
7.	Sutopo, dkk (2017).	<i>E-Government, Audit Opinion, And Performance Of Local Government Administration In Indonesia.</i>	Penerapan <i>e-government</i> berpengaruh positif terhadap kinerja administrasi pemerintah daerah
8.	Syamsul & Ritonga (2017).	Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia	Unsur tata kelola pemerintah daerah yang baik, yaitu transparansi berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah
9.	Temalagi, dkk. (2022).	<i>The Effect Of Accountability, Transparency And Internal Control On Value For Money-Based Budget Performance.</i>	Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan anggaran.
10.	Tullah, dkk. (2018).	Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> (GGG) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Jawa Barat dan Banten)	Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
11.	Wijayanti, dkk. (2020).	<i>Influence Good Governance on the Quality of Financial Statements with SIMDA as Variables Moderating Government in Pati Regency</i>	Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
12.	Wulandari & Bandi (2015).	Pengaruh <i>E-Government</i> , Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.	Penerapan <i>e-government</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan dengan pemaparan teori yang sudah dijelaskan serta penelitian terdahulu, akhirnya peneliti merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Berikut merupakan perumusan hipotesis dari penelitian ini.

2.3.1. Pengaruh *E-Government* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2019-2022

Pemanfaatan teknologi informasi secara baik dan optimal akan memengaruhi kinerja pemerintah agar dapat menjadi lebih baik. Kinerja pemerintah yang baik akan berpengaruh ketika menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Bandi, (2015), pelaksanaan *e-government* berpengaruh signifikan positif terhadap pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah yang tentunya memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik pemerintah daerah dalam penerapan pengembangan *e-government*, maka dengan tepat akan mempengaruhi pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Opini tersebut juga nantinya akan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah daerah dalam menerapkan atau melaksanakan dan mengembangkan *e-government*, maka dengan tepat maka akan mempengaruhi pemberian opini audit BPK RI atas

laporan keuangan pemerintah daerahnya yang mana opini tersebut juga memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Handayani, (2019) terdapat pengaruh positif dalam penerapan *e-government* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah. Jika penerapan *e-government* dilaksanakan dengan konsisten akan menghasilkan dampak baik bagi aparatur sipil negara dalam setiap laporan keuangan yang dibuat serta adanya penguasaan teknologi yang memadai dalam mendukung secara efektif dan efisien.

E-Government juga dipercaya mampu meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, serta meningkatkan penyampaian layanan yang efektif, dan memberdayakan pihak publik (dampak sosial) (Sutopo *et al.*, 2017). Ketika ketiga hal tersebut ingin dicapai, maka pemerintah dalam melaporkan pengelolaan keuangannya seharusnya termotivasi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sembari memanfaatkan *e-government* sebagai salah satu sistem informasi pemerintah. Penerapan teknologi informasi *e-government* dapat dipercaya mampu menata sistem manajemen, pelayanan, maupun proses kerja pemerintahan. Selain itu, penerapan *e-government* dipercaya akan menciptakan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta partisipasi publik dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Heryana, 2013). Langkah untuk mencapai tatanan kelola pemerintahan yang baik melalui *e-government* tentunya berpengaruh pada penyusunan pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Jika pemanfaatan *e-government* sudah maksimal maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sebaik mungkin agar berkualitas guna mencapai tatanan kelola pemerintahan yang baik.

Teori agensi dapat digunakan dalam menjelaskan penerapan *e-government* oleh pemerintah. Hal ini disebabkan untuk menghindari terjadinya asimetri informasi antara pihak *principal* dan *agent*. Dengan adanya sistem *e-government*, pemerintah dapat menyebarkan informasi yang perlu diketahui oleh publik sehingga tidak terjadi asimetri informasi. Salah satu informasi yang dapat disampaikan oleh pemerintah ialah dengan mengunggah laporan keuangan pemerintah. *E-government* merupakan salah satu sistem yang dapat memberikan

informasi terkait dengan kinerja nyata pemerintahan dalam pelayanan publik. Teori legitimasi dapat digunakan dalam menjelaskan *e-government* karena sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan *e-government* tersebut digunakan untuk melayani kepentingan publik. Pelayanan kepentingan publik merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat dalam menjalani tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta teori yang digunakan, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : *E-Government* Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2019-2022.

2.3.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2019-2022

Transparansi dapat dicapai dengan menerbitkan laporan keuangan (Haustein & Lorson, 2023). Kaitan transparansi dengan kualitas laporan keuangan daerah ialah dengan adanya transparansi mengindikasikan terdapat keterlibatan partisipasi secara terbuka kepada berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Partisipasi tersebut juga diimbangi dengan pengorganisasian tugas masing-masing divisi, mengungkapkan informasi secara faktual yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan akurat, serta pelaporan informasi kepada pejabat yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan daerah (Widaningrum & Fahriani, 2023). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintahan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan pemerintah daerah tentunya harus bersifat transparan agar dapat diakses oleh seluruh pihak guna untuk memperoleh informasi. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya harus berdedikasi dalam penyampaian informasi tersebut. Salah satu caranya ialah dengan menyusun dan mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas agar informasi yang terdapat di dalamnya dapat dimengerti oleh seluruh pihak (Surya Prayogo & Setiany, 2020).

Peraturan mengenai transparansi di Indonesia mulai dari ditetapkannya Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini mengatur pengelolaan informasi publik badan publik termasuk menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan penyelenggara daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan sehingga wajib mengimplementasikan UU KIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, di dalam kerangka konseptual yang tertera pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemda mengenai informasi keuangan yang bersifat terbuka dan jujur.

Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ketika instansi pemerintah telah menerapkan salah satu prinsip *Good Governance* yaitu transparansi dalam melaksanakan tugasnya, maka kualitas laporan keuangan dapat meningkat. Implementasi dari transparansi yang dilakukan secara optimal dan konsisten diharapkan membuat kegiatan pemerintahan beroperasi lebih baik termasuk dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penyampaian informasi keuangan sebagai wujud dari pertanggungjawaban serta keterbukaan publik kepada masyarakat (Pramita & Dharma, 2018). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Tullah *et al.*, 2018, memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara *good government governance*, salah satu unsurnya yaitu transparansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi atau keterbukaan yang terdapat pada publikasi pelaporan keuangan berhubungan erat dengan memberikan informasi keuangan kepada berbagai pihak dalam perencanaan suatu anggaran maupun penyampaian informasi berupa pengelolaan aset, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah daerah.

Terbukanya akses informasi mengenai laporan keuangan daerah kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset maupun pendapatannya agar dapat ditingkatkan menjadi lebih baik sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat akan pemerintahan yang bersifat transparan. Dengan begitu, pemerintah daerah tergerak untuk menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada khalayak umum yaitu masyarakat serta kepada

pejabat pemerintahan pusat. Transparansi juga diharapkan dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Dengan adanya kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi terutama mengenai pengelolaan keuangan, maka pemerintah akan berusaha untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas tersebut akan berguna bagi para pihak yang berkepentingan. Teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan transparansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena penyusunan laporan keuangan yang berkualitas juga merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada pihak publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abbas, dkk. (2022), dan Wijayanti, dkk. (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta teori yang digunakan, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H2 : Transparansi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Periode 2019-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dimana dalam melakukan analisis data berdasar pada angka, rumus, serta model matematis. Asumsi dasar penelitian kuantitatif ialah menggunakan perhitungan dari suatu rumus maupun bentuk perhitungan lainnya (Yusuf, 2014).

3.2. Populasi dan Sampel

Sampel yang terdapat pada penelitian kali ini ialah seluruh kabupaten/kota yang berada di Indonesia selama 4 tahun dimulai dari 2019 sampai dengan 2022. Sampel pada penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* dimana terdapat beberapa kriteria sebelum sampel tersebut dipilih. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencantumkan nilai indeks SPBE selama 4 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 s.d. 2022.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengunggah 12 dokumen transparansi selama 4 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 s.d. 2022.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencantumkan atau menjelaskan terkait opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah selama 4 tahun berturut-turut.

Sampel yang sesuai dengan kriteria tersebut berjumlah 1.188 Kabupaten/Kota untuk periode 2019-2022, berikut merupakan rincian pengambilan sampel penelitian.

Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Merupakan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia periode 2019-2022.	2.036
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak mencantumkan nilai indeks SPBE selama 4 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 s.d. 2022.	(819)
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak mengunggah semua 12 dokumen transparansi selama 4 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 s.d. 2022.	(28)
4.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak mencantumkan atau menjelaskan terkait opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah selama 4 tahun berturut-turut.	(1)
Jumlah Sampel		1.188

3.3. Variabel Penelitian

Berikut merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian.

3. 3. 1. Variabel Dependen (Y)

Kualitas LKPD merupakan variabel terikat atau dependen pada penelitian kali ini. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ada empat indikator dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain:

1. Relevan.
2. Andal.
3. Dapat dibandingkan.
4. Dapat dipahami.

Pada penelitian kali ini pengukuran kualitas LKPD dilihat dari opini audit dari BPK RI, sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Opini audit yang dikeluarkan oleh BPK RI terdiri dari:

1. Wajar tanpa pengecualian (WTP)
2. Wajar dengan pengecualian (WDP)
3. *Disclaimer* atau tidak memberikan pendapat (TMP).
4. *Adversed* atau tidak wajar.

Pengukuran kualitas LKPD dengan menggunakan opini audit adalah dengan memberikan nilai 4 apabila BPK RI menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian, 3 bila wajar dengan pengecualian, 2 bila tidak menyatakan pendapat, dan 1 bila tidak wajar pada masing-masing LKPD. Pengukuran tersebut berdasarkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beest & Boelens, 2009, Christiaens & Van Peteghem, 2007 dan Yuliani & Agustini, 2016 yang menyatakan bahwa opini audit mencerminkan kualitas laporan keuangan.

3. 3. 2. Variabel Independen (X)

Variabel tidak terikat atau indeppenden pada penelitian kali ini terdiri dari:

1. *E-Government*

E-Government dinilai melalui indeks SPBE (Sistem Pemeringkatan Berbasis Elektronik), sesuai dengan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2018. Adapun kriteria pengukuran indeks SPBE yang telah diatur pada Peraturan Menteri tersebut ialah sebagai berikut

1. Nilai indeks $< 1,8$: kurang
2. Nilai indeks $1,8 - < 2,6$: cukup
3. Nilai indeks $2,6 - < 3,5$: baik
4. Nilai indeks $3,5 - < 4,2$: sangat baik
5. Nilai indeks $4,2 - 5,0$: memuaskan

Pengukuran *e-government* menggunakan indeks SPBE dengan memberikan skor sesuai dengan nilai indeksnya yang tertera pada buku laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang terbit setiap satu tahun. Pengukuran *e-government* menggunakan indeks SPBE juga dipakai pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018 dan Wulandari & Bandi, 2015.

2. Transparansi

Dalam menentukan transparansi atau seberapa terbuka penyampaian informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan pemda adalah dengan melihat ketersediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran atau keuangan. Untuk jenis dokumen-dokumen tersebut dilihat berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dalam regulasi tersebut menjelaskan terdapat 12 dokumen yang terkait dengan pengelolaan anggaran atau keuangan yang harus disediakan oleh Pemda pada masing-masing *website* resminya. Dokumen tersebut terdiri atas: (1) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, (2) Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, (3) Raperda APBD, (4) Raperda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, (8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, (9) Laporan Realisasi Anggaran SKPD, (10) Laporan Realisasi Anggaran PPKD, (11) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta (12) Perda dan Opini atas LKPD

Pengukuran transparansi dengan memberikan nilai masing-masing 1 untuk satu dokumen tersedia dan 0 apabila terdapat dokumen yang tidak tersedia. Jika dokumen tersebut lengkap sejumlah 12, maka nilainya adalah 12. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Alwahidi & Darwanis, 2019 dan Listivaniputri & Yuhertiana, 2022.

Berikut merupakan tabel operasional variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3. 2 Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Menggunakan 4 opini audit yang diterbitkan oleh BPK RI: 1. Adverse 2. Disclaimer 3. WDP 4. WTP	Nominal
<i>E-government</i>	Menggunakan indeks SPBE yang diterbitkan oleh Kemenpanrb: 1. Nilai indeks < 1,8 : kurang 2. Nilai indeks 1,8 - < 2,6 : cukup 3. Nilai indeks 2,6 - < 3,5 : baik 4. Nilai indeks 3,5 - < 4,2 : sangat baik 5. Nilai indeks 4,2 – 5,0 : memuaskan	Interval
Transparansi	Memeriksa dokumen yang tersedia di <i>website</i> masing-masing Pemda berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: 1. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 2. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD 3. Raperda APBD 4. Raperda Perubahan APBD 5. Perda APBD 6. Perda Perubahan APBD 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD 9. Laporan Realisasi Anggaran SKPD 10. Laporan Realisasi Anggaran PPKD 11. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 12. Perda dan Opini atas LKPD	Nominal

3. 4. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Peneliti mencari dan mengumpulkan data tentang laporan keuangan tahunan yang diaudit secara kolektif. Peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data atau informasi terkait dengan data yang didapatkan melalui dokumen yang dapat diakses publik secara tidak langsung. Informasi tersebut dihimpun dari:

1. Untuk indeks SPBE melalui *website* resmi Kemenpanrb untuk mengakses dan mengunduh buku laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang terbit setiap satu tahun, dari tahun 2019-2022.
2. Untuk 12 dokumen transparansi diperiksa satu-persatu di *website* masing-masing kabupaten/kota dari tahun 2019-2022.
3. Untuk opini audit melalui dokumen laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2023 yang diakses dari permintaan informasi pada *website* PPID BPK RI.

3.5. Metode Analisis Data

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan uji analisis regresi berganda melalui aplikasi Excel serta SPSS 27. Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda karena pada penelitian ini terdiri atas dua variabel independen. Persamaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

X₁ : Variabel *E-Government*

X₂ : Variabel Transparansi

a : Konstansta

b₁ b₂ : Koefisien regresi dari variabel X₁ dan X₂

e : Kesalahan residual (error)

Persamaan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % atau 0,05. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Data tersebut

digambarkan secara apa adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang umum atau generalis. Penyajian statistik deksriptif dapat dideskripsikan dengan melalui tabel, grafik, diagram, serta perhitungan modus, median, dan mean (Sugiyono, 2021).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian multikolinieritas dan pengujian normalitas.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini memiliki 1188 sampel data panel yang digunakan untuk menguji penelitian ini. Laplace secara implisit berasumsi bahwa distribusi deviasi antara penduga dan nilai sebenarnya cukup mendekati bahwa data sudah distribusi normal untuk penerapan kuadrat terkecil pada sejumlah data yang memiliki sampel cukup besar (Fisher, 2010). Asumsi kenormalan sangat penting jika penelitian menggunakan ukuran sampel yang kecil atau terbatas karena hal ini dapat membantu memperoleh distribusi probabilitas yang tepat. Asumsi kenormalan tidak diperlukan jika sampel yang dimasukkan dalam penelitian berjumlah besar.

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Untuk mengetahui hal tersebut salah satu caranya adalah menggunakan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengitung nilai variabilitas variabel independen yang telah dipilih dan memiliki nilai rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (Ghozali, 2017). Asumsi dari Tolerance dan Variance Inflation Factor dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Jika $VIF > 10$ dan nilai Tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinearitas.
- b. Jika $VIF < 10$ dan nilai Tolerance > 0.10 maka tidak akan terjadi multikolinearitas.

3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk menguji suatu model regresi linear apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Apabila terjadi korelasi maka terdapat masalah autokorelasi. Model regresi ini dianggap baik jika terlepas dari autokorelasi (Ghozali, 2017). Untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan cara pengujian menggunakan metode Durbin Watson dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $d < dL$; maka terjadi autokorelasi positif.
- b. $d < 4 - dL$; maka terjadi autokorelasi negatif.
- c. $dU < d < 4 - dU$; maka tidak terjadi autokorelasi.
- d. $dL \leq d \leq dU$ atau $4 > dU \leq d \leq 4 - dL$; maka pengujian tidak menyakinkan.

3.5.3. Uji Hipotesis

3.5.3.1. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji *e-government* dan transparansi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi $< \alpha$, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya. Dengan tingkat signifikansi sebesar itu, maka kriteria pengujian uji t yaitu:

- a. Jika $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

- b. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

3.5.3.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R Square (Adjusted R²) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yaitu *e-government* dan transparansi mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R² bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika Adjusted R² bernilai kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

3.5.3.2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai signifikansi sebesar 5%. Dengan tingkat signifikansi sebesar itu, maka kriteria pengujian uji F yaitu:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam memberikan informasi, menjelaskan, dan menguji pengaruh dari *e-government* dan transparansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Variabel independen pada penelitian ini, yaitu *e-government* diukur dengan nilai indeks SPBE dan transparansi diukur dengan ketersediaan 12 dokumen transparansi. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu kualitas LKPD diukur dengan opini audit. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019-2022. Proses sampling pada riset ini menggunakan *teknik purposive sampling* dan jumlah sampel yang terpilih dengan total keseluruhan 1.188 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Analisis pengujian pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS 27 yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama (H1) penelitian diterima, membuktikan bahwa variabel *e-government* (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), di mana semakin tinggi nilai *e-government* maka akan semakin baik pula nilai yang dimiliki oleh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sebaliknya semakin buruk nilai *e-government* maka akan semakin buruk pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota suatu pemerintahan.
2. Hipotesis kedua (H2) ditolak, membuktikan bahwa variabel transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Sehingga semakin tinggi atau semakin rendah nilai transparansi pada suatu pemerintah daerah kabupaten/kota maka tidak akan

mempengaruhi bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota dari pemerintahan tersebut.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel independent pada penelitian ini hanya dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1,2%.
2. Variabel transparansi pada penelitian ini menggunakan pengukuran nominal.
3. Keterbatasan dalam mengakses sumber data yang dibutuhkan, seperti terdapat beberapa *website* pemerintah daerah yang tidak bisa diakses atau tidak memiliki *website* serta sedikitnya ketersediaan nilai indeks SPBE di tahun 2020 menyebabkan jumlah data yang dihasilkan cenderung berkurang.

5.3. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat 98,8% faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD, namun tidak diteliti pada penelitian ini. Peneliti memiliki saran untuk penelitian berikutnya untuk dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menggunakan pengukuran lain dalam pengukuran masing-masing variabel atau variabel lain yang memiliki bukti lebih kuat untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence Of Internal Control System Weaknesses And Audit Quality On The Quality Of Local Government Financial Reports In Indonesia With Good Government Governance As Moderating. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 461–474. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463>
- Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis *Website* Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 153. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10806>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022*.
- Bastian, I. (2023). *Public Sector Accounting* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Beest, F. Van, & Boelens, S. (2009). Quality Of Financial Reporting : Measuring Qualitative Characteristics. *NiCE Working Paper 09-108, April*, 1–41. www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_09108.pdf
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting Transparency And Accountability Through Icts, Social Media, And Collaborative E-Government. *Transforming Government: People, Process And Policy*, 6(1), 78–91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>
- Budiawan, F. P., & Nuryati, T. (2022). Understanding the Implementation of Good Government Governance (GGG) on The Quality of Public Services. *Journal of Accounting and Finance Management*, 3(3), 105–120. <https://doi.org/10.38035/jafm.v3i3.99>
- Christiaens, J., & Van Peteghem, V. (2007). Governmental Accounting Reform: Evolution of the Implementation in Flemish Municipalities. *Financial Accountability and Management*, 23(4), 375–399. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2007.00434.x>
- Erawati, T., & Hamanay, A. S. (2022). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi kasus pada Desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 10(01), 17–25. <https://doi.org/10.26460/ja.v11i1.2990>
- Fisher, H. (2010). The Prehistory: De Moivre's Theorem. In *A History of the Central Limit Theorem*.
- Gamayuni, R. R. (2018). Basis Akrua Basis Akrua. In *Pusaka Media*.
- Hartono, & Ramdany. (2020). Pengaruh SAP, Pengendalian Intern dan Kompetensi

- SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–23.
- Haustein, E., & Lorson, P. C. (2023). Transparency of Local Government Financial Statements: Analyzing Citizens' Perceptions. *Financial Accountability & Management*, 39(2), 255–446. <https://doi.org/10.1111/faam.12353>
- Heryana, T. (2013). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.17509/jrak.v1i1.6572>
- Khikmah, S. U., Hizazi, A., & Yudi, Y. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 4893–4908. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.12536>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Listivaniputri, A., & Yuhertiana, I. (2022). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia yang di Survei KPK Tahun 2018). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 1965–1975.
- Nordiawan, D. (2012). Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Salemba Empat.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2003). Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2003). Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2004). Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2008). Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2018). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2022). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

- Pramita, I. I. G. A. A. P., & Dharma, S. I. D. G. (2018). Effect Of Application Of Good Governance, Government Accounting Standards And Apparatus On Quality Of Financial Statements. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 6(June), 496–504.
- Purnomo, A. Y. P., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Good Governance Dan E-Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–20.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Redjo, P. R. D. (2018). Efek Moderasi Pada Pengaruh Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1–18.
- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i1.4505>
- Rohmatun, A., Azizah, N., & Najicha, F. U. (2022). Law , Development & Justice Review Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Law , Development & Justice Review. *Law, Development & Justice Review*, 5(3), 237–247.
- Rompas, F. V., dan Kindangen, W. D. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 461–468.
- Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Surya Prayogo, I., & Setiany, E. (2020). The Influence of Government Transparency, Implementation of the Government Accounting Standards and Internal Control System on Quality of Financial Statement (A Survey Conducted in the Village Administration Bandung Regency, Indonesia). *Scholars Bulletin*, 6(7), 174–181. <https://doi.org/10.36348/sb.2020.v06i07.001>
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-Government, Audit Opinion, And Performance Of Local Government Administration In Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6–22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2>

- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Temalagi, S., Anakotta, F. M., & Siahaya, M. D. (2022). The Effect Of Accountability, Transparency And Internal Control On Value For Money-Based Budget Performance. *3rd International Seminar on Accounting Society "The Review and Outlook of The Economy after Covid 19 Pandemic,"* 257–270.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten). *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975>
- West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15–27.
- Widaningrum, V. D., & Fahriani, F. Z. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Responsivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2425–2435. <https://doi.org/10.56457/jimk.v10i2.286>
- Wijayanti, W., Warno, W., & P, A. K. (2020). Influence Good Governance on the Quality of Financial Statements with SIMDA as Variables Moderating Government in Pati Regency. *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)*, 1(2), 58. <https://doi.org/10.22441/jiess.2020.v1i2.002>
- Winata, D., & R, A. (2020). Pengaruh Proporsi Kepemilikan Publik Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 1614. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9356>
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 148. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.184>
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL BISNIS & EKONOMI*, 14(1), 56–64. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (1st ed.). Prenamedia Group.

Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Slemen. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978–988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>